

TESIS

**POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI INDONESIA**



GERRY ALVINDO DANIEL MUNTHE

No. Mahasiswa: 195203075/PS/MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

TESIS

**POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI INDONESIA**



GERRY ALVINDO DANIEL MUNTHE

No. Mahasiswa: 195203075/PS/MH



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : GERRY ALVINDO DANIEL MUNTHE
Nomor Mahasiswa : 195203075/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.	31 Mei 2021	
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M	17 Mei 2021	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : GERRY ALVINDO DANIEL MUNTHE
Nomor Mahasiswa : 195203075/PS/MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

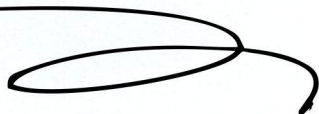
Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
(Ketua) Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.	17 Juni 2021	
(Sekretaris) Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M	17 Juni 2021	
(Anggota) Dr. Sumarsono Raharjo Ign, S.H., M.Hum.	17 Juni 2021	

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gerry Alvindo Daniel Munthe
No. Mahasiswa : 195203075/PS/MH
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Menyatakan bahwa tesis dengan judul:

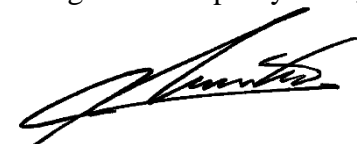
“Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” adalah benar-benar orisinal hasil karya saya.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam rangka tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin/meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat/pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan terhadap penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jakarta, 24 Mei 2021

Yang memberi pernyataan,



(Gerry Alvindo Daniel Munthe)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis dengan segala kerendahan hati terbuka untuk kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis dalam menjalani rancangan-Nya yang baik.
2. Keluarga penulis yaitu Drs. Gunawan Munthe, Dra. Reni Tjandra, Harry Kevinta Jonathan Munthe, S.T., Devina Graciella Andini Munthe. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang selalu diberikan
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, sekaligus Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Dr. Ir. A. M. Ade Lisantono, M.Eng, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh *Civitas Academica* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya pada Departemen Pascasarjana dan Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjalani proses kuliah.
7. Catherine De Putri yang selalu memberikan kepercayaan pada penulis.
8. Rekan-rekan kerja di EngageMedia yang selalu mendukung proses penyelesaian studi penulis.
9. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan semester gasal tahun 2019.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berperan dan membantu penulis selama masa studi dan proses penyusunan tugas akhir penulis.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberkati, membimbing dan melimpahkan kasih setia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Mei 2021

Gerry Alvindo Daniel Munthe

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	V
KATA PENGANTAR.....	VI
HALAMAN DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	XI
ABSTRAK	XII
DAFTAR SINGKATAN.....	XIV
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Mengenai Politik Hukum	16
B. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	20

C. Tinjauan Mengenai Pembangunan Berkelanjutan	37
D. Landasan Teori	50
E. Batasan Konsep.....	52
BAB III. CARA PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan	55
C. Data Yang Dikumpulkan	56
D. Langkah-Langkah Penelitian.....	60
E. Metode Analisis dan Pengambilan Kesimpulan	61
F. Hambatan yang Dihadapi Selama Penelitian	63
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Keselarasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	64
1. Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan	64
2. Analisa Keselarasan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	70
B. Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Berkelanjutan	108
1. Rancangan Undang-Undang Sebagai Perkembangan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia.....	108

2. Politik Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan	129
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar 17 Tujuan/ <i>Goals</i> Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	47
Tabel 2. Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan.....	69

ABSTRAK

Konsep pembangunan ekonomi konvensional semakin mendapatkan kritik dari masyarakat global. Konsep ini dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan saat ini. Karena dinamika ini, semakin dirasakan tuntutan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan perspektif ke arah pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan penyesuaian peraturan perundang-undangan, sehingga hukum dapat tetap relevan dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian peraturan hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dikenal dengan istilah politik hukum.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kontribusi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Bisnis sebagai bagian penting dari pembangunan memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya dalam kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan yang biasa dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun, regulasi TJSL Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang yang menyebabkan implementasi TJSL menjadi tidak efektif. Proses pembuatan undang-undang yang secara spesifik mengatur TJSL juga menghadapi masih menghadapi banyak tantangan.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dan keselarasan regulasi TJSL di Indonesia dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan analisa terhadap nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dipahami bahwa pada umumnya regulasi TJSL saat ini telah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya nilai dalam TPB yang terkandung dalam regulasi TJSL.

Tujuan kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan TJSL seharusnya beradaptasi agar dapat menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisa terhadap Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU TJSP), kesamaan nilai yang dimiliki RUU dengan konsep pembangunan berkelanjutan menunjukkan telah digunakannya pertimbangan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RUU. Namun demikian, RUU TJSP belum secara spesifik mengatur beberapa aspek penting dalam TJSL yang diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan pelaksanaan TJSL. Hal-hal tersebut penting untuk diatur agar pengaturan TJSL dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan sehingga implementasi TJSL dapat dilakukan secara efektif.

Kata Kunci: politik hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pembangunan berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), perusahaan.

ABSTRACT

The concept of conventional economic development has been criticised in the global community. This concept is often considered obsolete and irrelevant to the current society and the environment condition. Due to this dynamic in society, there are rising demands for sustainable development. This perspective changes towards sustainable development requires law and regulation to adjust, hence law could stay relevant and even support the achievement of sustainable development. Adjustment of legal regulations to achieve the goals desired by society is known as legal politics.

Achieving sustainable development requires active contributions from all stakeholders, including the private sector. Business as an important part of development plays an important role in sustainable development, one of which is in its contribution to society and the environment, which is commonly known as CSR. However, current Indonesia CSR regulations are still scattered in various Acts and cause ineffective implementation of CSR. The progress of making Act dedicated to CSR also still faces many challenges.

This research first aim is to explain how Corporate Social Responsibility (CSR) law and regulation in Indonesia are aligned and support Sustainable Development Goals (SDGs) achievement. To achieve this aim, analysis of the values in various Acts which contain CSR regulations was carried out to be compared with the Sustainable Development Goals (SDGs), which is an indicator of the sustainable development achievement. Based on the analysis, it is understood that most of the the current CSR regulations are in line with the principles of sustainable development. This can be seen from the many SDGs values which are contained in the CSR regulations.

The second one is how CSR law and regulation should adapt to overcome the sustainable development challenges in the context of business regulation. Based on the analysis of the Act Draft on Corporate Social Responsibility, it is understood that the proposed Act has used the consideration of sustainable development, which can be seen from the similarity of values between the Act Draft and sustainable development concept. However, the proposed Act has not specifically regulated several important aspects of CSR that are needed to synergise various interests of stakeholders in the implementation of CSR. This is important for the CSR regulations to fulfil so that the CSR regulation can be accepted by all shareholders and the implementation of CSR can be carried out effectively.

Keywords: legal politics, Corporate Social Responsibility (CSR), sustainable development, Sustainable Development Goals (SDGs), company/ corporation.

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
BUMN	:Badan Usaha Milik Negara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
<i>CSR</i>	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
<i>GCG</i>	: <i>Good Corporate Governance</i>
ISO	: International Organization for Standardization
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
<i>MDGs</i>	: <i>Millennium Development Goals</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUU	:Rancangan Undang-Undang
<i>SDGs</i>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TJSP	: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

UNDP	: United Nations Development Programme
UNGC	: United Nations Global Compact
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPM	: Undang-Undang tentang Penanaman Modal
UUPPLH	: Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPT	: Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
WCED	: World Commission on Environment and Development